



Jakarta, 16 Juli 2021

Nomor : 001-T/KPA/AMAN/WALHI/2021  
Perihal : SURAT TERBUKA AMAN, KPA, WALHI

Kepada Yth,

1. Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo
2. Pimpinan DPR RI

Di Tempat,

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang memiliki konstituen puluhan ribuan komunitas serta kelompok masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Konstituen kami adalah masyarakat adat, petani, nelayan, kelompok miskin kota, buruh tani dan perkebunan –perempuan dan laki-laki, yang telah merasakan dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi dalam 17 (tujuh belas) bulan terakhir.

Penanganan pandemi yang tidak terintegrasi dan menyeluruh selama ini telah membawa kehidupan masyarakat pada situasi yang penuh ketidakpastian dan selalu dibayangi ancaman infeksi covid-19. Wilayah-wilayah masyarakat adat yang selama setahun terakhir berusaha kami jaga dan lindungi dengan pembatasan keluar-masuk orang pada akhirnya tidak mampu lagi menahan penyebaran covid-19, dan telah mengakibatkan jatuhnya korban. Kebijakan yang senantiasa ambigu; di satu sisi melakukan pembatasan namun di sisi lain membuka mobilitas manusia antar-daerah maupun antar-negara, ditambah tidak meratanya akses testing, serta tidak adanya keseriusan dalam pelacakan, telah mengakibatkan risiko penularan yang tinggi serta memberikan tekanan yang besar terhadap fasilitas layanan kesehatan.

Lebih lanjut kami mencatat pembiaran atas berlangsungnya aktivitas korporasi yang secara agresif merambah ke wilayah-wilayah hidup petani, nelayan, dan masyarakat adat mengakibatkan terus terjadinya konflik dan mengakibatkan situasi yang tidak aman bagi masyarakat untuk mencari nafkah, memenuhi hajat hidupnya sehari-hari. Sementara di sisi lain, pemerintah melalui kebijakan pembatasan mobilitas seperti PPKM menerapkan tindakan yang keras terhadap kelompok masyarakat kecil yang terpaksa masih harus beraktivitas di luar rumah untuk mencari nafkah.

Kami memahami kebijakan pembatasan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran covid-19, yang terus meningkat. Kebijakan PPKM yang telah diambil pemerintah tersebut pasti berimplikasi pada aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama pangan dan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan aksi nyata agar hak-hak dasar warga negara termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, serta masyarakat marjinal lainnya tetap dapat dipenuhi, terutama hak atas pangan dan kesehatan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menyampaikan beberapa catatan yang perlu segera mendapatkan perhatian Pemerintah, sebagai berikut:

1. Kebijakan PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 harus ditindaklanjuti dengan kebijakan lain, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan dasar terutama pangan dan layanan Kesehatan kepada masyarakat. Efektivitas kebijakan PPKM akan sangat tergantung kepada sejauh mana masyarakat dapat membatasi aktivitas kesehariannya; dalam hal aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah, maka dukungan Pemerintah dalam memenuhi layanan pangan dan kesehatan selama masa PPKM Darurat adalah faktor kunci;
2. Untuk meningkatkan jumlah tes harian dan meningkatkan kualitas pelacakan, maka seharusnya layanan tes, setidaknya tes swab antigen, bisa dilakukan secara masif dan gratis bukan hanya kepada warga yang termasuk dalam kategori kontak erat atau suspek, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana diketahui, virus korona dapat tinggal di tubuh manusia tanpa menimbulkan gejala, dan mengakibatkan penularan kepada manusia lainnya. Tes swab PCR sebagai metode yang sejauh ini dianggap paling meyakinkan untuk mendeteksi covid-19, harus dilakukan secara mudah dan murah, sehingga petani, masyarakat adat, serta masyarakat marjinal lainnya bisa dengan mudah mengaksesnya. Kami menekankan agar pemerintah secara tegas menghentikan praktik komersialisasi tes, baik swab antigen maupun PCR tersebut;
3. Kami mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat akibat pandemi covid-19. Kami mendorong adanya transparansi publik terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar realokasi dan refocusing anggaran memberi dampak signifikan bagi kedaulatan pangan dan kesehatan masyarakat, serta terhindar dari praktik-praktek korupsi. Kami menghimbau kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti langkah baik ini, dan menghentikan proyek-proyek mercusuar yang bukan merupakan kebutuhan urgent di masa pandemi ini, dan anggaran proyek-proyek mercusuar tersebut perlu direalokasi untuk penguatan upaya penanganan wabah terutama untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat;
4. Berkaitan dengan vaksin dan vaksinasi kami berpandangan: Pertama, vaksin dan vaksinasi adalah salah satu langkah penting agar bangsa ini dapat mengendalikan pandemi covid-19. Vaksin dan vaksinasi karena itu ditempatkan sebagai kewajiban negara dan di sisi lain merupakan hak warga negara tanpa kecuali untuk mendapatkannya. Bertalian dengan itu, kami berpandangan bahwa memperjualbelikan vaksin covid-19 adalah ide, gagasan, dan kebijakan yang tidak dapat dibenarkan. Kedua, banyak informasi yang tidak bertanggungjawab tentang vaksin di masyarakat sehingga masyarakat menghadapi kebingungan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai vaksin agar masyarakat memahami secara lebih utuh. Di samping sosialisasi, Pemerintah perlu mengeluarkan informasi yang valid tentang asal-usul vaksin,

efikasi, dan dampak sehingga kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program vaksinasi meningkat. Ketiga, vaksin seharusnya tidak dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan warga negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya.

Dan pemerintah tidak menjadikan sertifikasi vaksin ini sebagai syarat administrasi dalam layanan publik. Keempat, pemerintah harus segera memperbaiki proses vaksinasi, dan menghentikan proses-proses vaksinasi terpusat yang malah menimbulkan kerumunan dan memperbesar risiko penyebaran covid-19;

5. Selain itu, dalam hal vaksinasi, pemerintah masih belum fokus kepada masyarakat yang tinggal dipelosok-pelosok daerah. Sampai saat ini kami temukan bahwa pelaksanaan vaksinasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat adat, petani, dan nelayan yang hidup di pedesaan dan wilayah-wilayah yang jauh dari kota. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempercepat distribusi dan memperbaiki proses vaksinasi bagi masyarakat di pedesaan tersebut;
6. Untuk masyarakat kecil yang masih bekerja, berjualan, dan beraktivitas selama PPKM, pemerintah seharusnya memberikan insentif dan tidak serta merta mengenakan sanksi (denda, dll) jika melanggar aturan PPKM. Insentif dan fasilitasi pemerintah hendaknya tidak diberikan dalam bentuk bantuan sosial sebagaimana dilakukan di tahun lalu, yang berisiko tinggi untuk dikorupsi, menguntungkan segelintir pengusaha penyuplai paket bantuan, dan tidak memberikan dampak ekonomi ikutan pada kelompok masyarakat. Kami berpendapat, fasilitasi pemerintah diberikan dalam bentuk tunai, sehingga bisa ikut menggerakkan ekonomi rakyat di tingkat lokal. Distribusi bantuan tunai langsung, dilakukan dengan cara yang sederhana dan efektif dengan prinsip transparansi sehingga mudah diawasi sehingga praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan anggaran dapat dicegah;
7. Dalam catatan akhir tahun KPA tahun 2020, di tengah minusnya perekonomian nasional dan penerapan PSBB karena situasi pandemi covid-19, perampasan tanah berskala besar tidak menurun, tetap tinggi, dan cara-caranya makin tak terkendali. Sedikitnya telah terjadi 241 letusan konflik agraria. Konflik tersebut tersebar di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 KK di atas tanah seluas 624.272,711 hektar. Dari data tersebut, Kami menemukan bahwa aktivitas-aktivitas perusahaan di berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan di atas ruang ruang hidup masyarakat adat dan petani tidak berkurang sama sekali. Hal tersebut menyebabkan masyarakat adat dan petani mengalami kesulitan untuk menjaga keselamatan dirinya. Oleh karena itu Pemerintah harus mengambil keputusan yang tegas disertai dengan pemberian sanksi agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan merampas ruang-ruang hidup masyarakat adat, petani dan nelayan selama masa pandemi covid-19 segera menghentikan aktivitasnya. Dalam situasi demikian, anggaran proyek-proyek infrastruktur dialihkan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kesehatan rakyat.
8. Pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengawasi dan menghentikan praktik-praktik diskriminatif di masyarakat terkait dengan pengobatan sampai pada pemakaman korban covid-19. Pemerintah harus bisa memastikan tidak adanya stigmatisasi terhadap pasien covid-19 serta dilindunginya hak setiap warga negara, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, serta keyakinan, mulai sejak pemberian layanan kesehatan hingga proses pemakaman bagi para korban pandemi covid-19.
9. Kami mendesak pemerintah untuk secara serius mendengarkan ahli kesehatan yang kompeten dalam penanganan pandemi, dan mengambil kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan hanya memikirkan keberlangsungan bisnis pengusaha skala besar yang selama ini sudah mendapatkan berbagai fasilitas dan kemudahan dari negara.

Tidak akan ada ekonomi yang berkelanjutan di tengah berlarutnya pandemi dan kualitas kesehatan masyarakat yang rendah.

Demikian kami sampaikan. Semoga Tuhan Penguasa Alam Semesta senantiasa melindungi bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat di Nusantara.

Hormat kami,



Rukka Sombolinggi  
**Sekretaris Jenderal  
Aliansi Masyarakat  
Adat Nusantara  
(AMAN)**



Dewi Kartika  
**Sekretaris Jenderal  
Konsorsium Pembaruan Agraria  
(KPA)**



Nur Hidayati  
**Direktur Eksekutif National  
Wahana Lingkungan Hidup  
(WALHI)**

Tembusan :

1. *Arsip PB AMAN*
2. *Arsip Seknas KPA*
3. *Arsip Seknas WALHI*